

**Peran Pemerintah Korea Selatan Dalam Mengatasi Ancaman *Cyberbullying*
Terhadap *Personal Security* Bintang Korea Tahun 2019-2020**

Fadhilah Permata Nira^{1*}

Universitas Slamet Riyadi

*Email: dhipermata@gmail.com

ABSTRACT

The development of technology, information, and communication is not only moving in a positive direction. There are negative impacts brought about by these developments, such as cyberbullying, that could disrupt physical and mental health. Therefore, the South Korean Government seeks to address the threat of cyberbullying with preventive and intervention actions. The Government of South Korea's efforts in addressing the threat of cyberbullying to people's mental health, especially the Korean Star as a vulnerable group, correlate with South Korea's commitment to implement the concept of Human Security, especially personal security, massively in South Korea. This proves that the South Korean government needs to catch up in implementing traditional security concepts but is also not involved in non-traditional security. Using qualitative methods with secondary data management, the research aims to examine the effectiveness of policies the South Korean government has taken in addressing cyberbullying threats to Korean stars' security from 2019 to 2020. The results of this study show that the South Korean government's policy has yet to be effective in addressing the cyberbullying threat to The Korean Star's security. This is due to the lack of balance between preventive measures and interventions carried out by the Government of South Korea, so the suicide rate caused by the stress of being a victim of cyberbullying is still one of the reasons Korean stars end their lives.

Keywords: Human Security, Personal Security, Cyberbullying, Suicide, the Role of the South Korean Government.

1. Pendahuluan

Penelitian ini mengkaji tentang peran Pemerintah Korea Selatan dalam menghadapi ancaman *cyberbullying* terhadap *personal security* bintang Korea sejak 2019. Sebagai salah satu fenomena global, *cyberbullying* penting untuk diteliti karena merupakan salah satu hal yang dapat mengganggu kesehatan mental sehingga memicu munculnya gangguan kecemasan, depresi bahkan bunuh diri (Saltz, 2017). Bintang Korea merupakan kelompok rentan yang lebih mudah menjadi korban *cyberbullying* akibat popularitasnya dibandingkan masyarakat biasa (Halodoc, 2020). Bunuh diri akibat *cyberbullying* di kalangan bintang Korea cukup marak terjadi (Dae-o, 2020). Diketahui sejak tahun 2008 hingga 2019 telah terjadi 30 kasus bunuh diri bintang Korea akibat *cyberbullying* (Dae-o, 2020).

Permasalahan kesehatan mental merupakan salah satu permasalahan serius di negara-negara maju salah satunya Korea Selatan karena persoalan ini dapat menyebabkan tingginya tindakan bunuh diri (Sang-Uk, et al., 2018). Ini terlihat dari ranking Korea Selatan sebagai negara anggota *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dengan tingkat bunuh diri tertinggi dalam lebih dari satu dekade terakhir (OECD, 2017). Fakta ini menunjukkan bahwa adanya kondisi tidak aman yang dirasakan oleh masyarakat Korea Selatan yang merujuk pada ancaman terhadap *personal security*.

Ancaman terhadap *personal security* ini penting untuk dilihat dalam konsep *human security* terutama terkait dengan kebijakan Pemerintah Korea Selatan terhadap persoalan kesehatan mental yang dapat mengalami gangguan karena beberapa hal salah satunya adalah *cyberbullying*. Penelitian ini mencoba untuk melihat efektivitas dari kebijakan-kebijakan terkait kesehatan mental yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Korea Selatan sebagai aksi preventif atau pencegahan bunuh diri melalui konsep *Human Security*. Penelitian ini berfokus pada peran Pemerintah Korea Selatan dalam mengupayakan terselenggaranya konsep *Human Security* terutama *personal*

security bintang Korea selaku masyarakat, kelompok rentan dan alat *soft power diplomacy* Korea Selatan.

Persoalan terkait *cyberbullying* maupun *human security* telah diteliti dengan beragam perspektif seperti tulisan dari Bhat, Chang, & A (2013) yang berjudul *Cyberbullying in Asia* menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah memiliki signifikansi pengaruh dalam menekan tindakan *cyberbullying*. Dalam mengatasi *cyberbullying* sebagai akibat negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penggunanya tapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah (Daniel, 2021:2). Hal ini sesuai dengan tulisan Daniel Sabda dalam Urgensi *Cyberbullying* dalam *Personal Security* sebagai Salah Satu Elemen *Human Security*.

Kaitan antara *cyberbullying* dan *personal security* merupakan hal yang tidak bisa dilupakan. *Cyberbullying* menjadi hal yang berbahaya dan menakutkan bagi bintang Korea. Hal ini sesuai dengan tulisan Shim Doobo dalam *The Cyber Bullying of Pop Star Tablo and South Korean Society: Hegemonic Discourses on Educational Background and Military Service*. Sedangkan, dalam penelitian Lee Sang-Uk, Park Jong-ik, Lee Soojung, Oh In-Hwan, Choi Joong-Myung dan Oh Chang-Mo yang berjudul *Changing trends in suicide rates in South Korea from 1993 to 2016: a descriptive study* menjelaskan tentang berbagai kebijakan ataupun program Pemerintah Korea Selatan yang telah digunakan sebagai upaya preventif dalam menekan tingkat bunuh diri di Korea Selatan sejak 2004 hingga 2016 (Sang-Uk, et al., 2018: 1-9). Keterbatasan Penelitian-penelitian sebelumnya secara garis besar hanya melihat pada satu aspek pendekatan semata padahal konsep *human security* memiliki dua aspek pendekatan yaitu *top-down* dan *bottom-up*. Hal ini yang kemudian menjadi *novelty* atau kebaruan dalam penelitian ini.

2. Kerangka Konseptual

Dalam membantu peneliti untuk menjawab dan menganalisis pertanyaan penelitian terkait ancaman *cyberbullying* terhadap *personal security* bintang Korea maka peneliti menggunakan konsep *Human security* dengan pendekatan *Top-down* dan *Bottom-up*. Konsep *Human security*

dengan pendekatan *Top-down* dan *Bottom-up* dipilih karena keduanya memiliki kaitan yang erat dan tidak dapat dilihat secara terpisah sehingga meskipun ada peran dari berbagai pihak namun umumnya diakomodir oleh Pemerintah Korea Selatan. Kolaborasi antara kedua pendekatan ini dapat dilihat sebagai upaya yang jauh lebih efektif dalam mengatasi ancaman terhadap *personal security*.

Dalam menganalisis lebih lanjut terkait fenomena tersebut di Korea Selatan maka perlu memahami konsep *Human Security* terlebih dahulu. *Human Security* merupakan sebuah konsep baru dalam pemaknaan keamanan. Sebelumnya, konsep keamanan menjelaskan bahwa kondisi aman suatu negara terjadi apabila adanya keamanan wilayah, keamanan untuk mencapai kepentingan nasional salah satunya lewat pengambilan kebijakan luar negeri, bebas dari ancaman nuklir, sehingga lebih berorientasi pada keamanan negara bukan masyarakat (United Nations Development Programme, 1994: 22). Konsep keamanan di atas merujuk pada konsep keamanan tradisional yang mana lebih menekankan pada relasi politik, ideologi dan militer antar negara terutama saat perang dingin (United Nations Development Programme, 1994:22).

Sedangkan konsep *Human Security* tidak berfokus pada kekuatan militer tapi pada kehidupan manusia dan keberagaman (United Nations Development Programme, 1994: 22). Merujuk pada *The Human Development Report 1994*, *Human Security* yang memiliki pertimbangan dasar untuk memfokuskan empat hal sebagai karakteristik utama yaitu pertama, *Human Security as universal concern* adalah anggapan bahwa konsep ini relevan bagi siapapun baik di negara kaya maupun negara miskin karena pada umumnya ancaman yang memungkinkan dialami oleh setiap manusia hampir sama. Kedua, *The component of Human Security are independent* artinya konsep ini jika diterapkan secara baik di seluruh dunia maka negara-negara akan mengalami perkembangan sehingga masalah-masalah terkait kelaparan, pengangguran, terorisme dan lain-lain dapat lebih mudah diatasi dan

negara-negara di dunia terutama negara berkembang dan miskin bisa bergerak ke kondisi yang jauh lebih mandiri.

Ketiga, *Human Security is easier to ensure through early prevention than later intervention* maksudnya adalah pemenuhan terhadap *Human Security* lebih bisa dioptimalkan dengan aksi pencegahan atau preventif dibandingkan dengan aksi intervensi. Hal ini karena tindakan pencegahan dapat dipakai sebagai upaya meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul. Upaya preventif dapat berupa edukasi, sosialisasi atau penyediaan pelayanan dan fasilitas terkait suatu isu atau fenomena yang sedang dihadapi serta bisa juga sebagai strategi atau program yang dipersiapkan untuk mencegah bahkan mengatasi masalah yang telah diprediksi. Sedangkan, aksi intervensi baru hadir ketika munculnya ancaman atau gangguan terhadap implementasi maupun optimalisasi konsep *Human Security*.

Hal ini membuat aksi intervensi harus bersifat frontal dalam mengatasi suatu fenomena. Aksi intervensi biasanya berupa berbagai kebijakan hukum, undang-undang atau kerangka legal terkait yang mengatur tentang sanksi atau hukuman bagi individu yang menciptakan ancaman terhadap implementasi konsep *Human Security*. Selain itu, aksi intervensi juga mengupayakan berbagai hal yang mana mampu mengatasi ancaman terhadap konsep *Human Security* serta sebagai strategi lain yang mendukung strategi preventif. Hal yang paling membedakan aksi intervensi dengan preventif adalah aksi intervensi memiliki tujuan untuk memberikan efek jera sehingga sering dikaitkan dengan produk hukum sedangkan aksi preventif lebih sering disejajarkan dengan upaya sosialisasi, edukasi, atau fasilitas dan pelayanan.

Keempat, *Human Security is people-centred* adalah kondisi di mana masyarakat hidup dan menjalankan kehidupan dengan aman dan bebas sesuai dengan kehendak dan tanpa ada tekanan maupun ancaman dari manapun. Pemaknaan keamanan tidak terbatas pada keamanan negara atau kedaulatan negara secara general melainkan pada keamanan dari kehidupan setiap masyarakatnya (United Nations Development Programme, 1994:

22-23). Konsep *Human security* hadir dengan dua komponen utama yaitu “*freedom from fear and freedom from want*” (United Nations Development Programme, 1994: 24). Komponen ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk bebas dari rasa takut dan bebas untuk menentukan apa yang diinginkan karena konsep keamanan yang dulunya berfokus pada kedaulatan wilayah bergeser menjadi keamanan manusia dan keamanan yang sebelumnya dilihat hanya dari kekuatan persenjataan berubah ke arah pembangunan manusia yang berkelanjutan (United Nations Development Programme, 1994: 24).

Oleh karena itu, hal-hal yang harus dipenuhi atau dicapai oleh setiap individu dikelompokkan menjadi *economic security* (keamanan ekonomi), *food security* (keamanan pangan), *health security* (keamanan kesehatan), *environmental security* (keamanan lingkungan), *personal security* (keamanan individu), *community security* (keamanan kelompok) dan *political security* (keamanan politik) (United Nations Development Programme, 1994: 24-33). Dari tujuh komponen tersebut peneliti akan memfokuskan penelitian pada komponen *personal security* atau keamanan individu. *Personal security* (keamanan individu) merupakan keamanan yang harus dimiliki oleh setiap individu terutama keamanan dari berbagai bentuk kekerasan dan ancaman seperti ancaman dari negara lewat kekerasan fisik, ancaman dari negara lain lewat perang, ancaman dari kelompok lain seperti konflik etnis, ancaman dari individu atau geng terhadap individu atau geng lain seperti kekerasan di jalan, ancaman terhadap perempuan seperti pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, ancaman dan kekerasan terhadap anak seperti *child abuse* dan ancaman atau kekerasan lewat diri sendiri seperti bunuh diri dan penggunaan narkoba (United Nations Development Programme, 1994: 30-31).

Pada penelitian ini ancaman yang akan dikaji adalah terkait kekerasan terhadap diri sendiri yaitu bunuh diri yang dilakukan oleh bintang Korea akibat *cyberbullying*. Untuk menganalisis studi kasus di atas dengan konsep *Human Security* maka perlu menggunakan jenis pendekatan. Dalam konsep *Human*

Security ada dua pendekatan yang dapat digunakan sebagai alat analisis yaitu *Top-down approach* dan *Bottom Up approach* (Boer & Wilde, *Top-Down and Bottom-Up Approaches to Human Security*, 2008:11). Pendekatan *Top-down* merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat upaya, fungsi dan peran dari pemerintah maupun organisasi *intergovernmental* terkait perumusan kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan komponen dari konsep *Human Security* sedangkan pendekatan *Bottom-Up* adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat peran, fungsi dan usaha dari individu, kelompok atau organisasi *non-governmental* dalam mengakomodir berbagai isu untuk ditindaklanjuti oleh kelompok pengambil kebijakan serta memiliki tanggung jawab untuk mengkritisi peran dari pemangku kebijakan (Boer & Wilde, *Top- Down and Bottom-Up Approaches to Human Security*, 2008:11).

Merujuk pada definisi di atas maka peneliti akan menggunakan pendekatan *Top-down* dan *Bottom-up* untuk melihat peran Pemerintah Korea Selatan utamanya dalam pengambilan kebijakan terkait ancaman terhadap *personal security* yang terjadi pada bintang Korea serta relasi maupun kolaborasi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak non pemerintah dengan pihak pemerintah. Hal ini karena kedua pendekatan tersebut tidak dapat dipisahkan melainkan harus digunakan secara sirkular untuk melihat efektivitas peran dari Pemerintah Korea Selatan dan pihak-pihak lain yang memang turut serta dalam mengupayakan berbagai program pencegahan bunuh diri dan penyediaan layanan kesehatan mental. Meskipun terlihat memberikan porsi lebih dalam aksi preventif ternyata Korea Selatan juga telah memiliki berbagai kerangka hukum yang diperuntukkan untuk menjamin keamanan beraktivitas di dunia siber namun berbagai strategi baik secara intervensi maupun preventif yang telah dibangun oleh Korea Selatan sejak 1995 hingga kini belum secara total menekan fenomena bunuh diri akibat kejahatan siber. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih jauh hal apa yang menjadi penyebab belum adanya solusi yang cukup efektif dalam menekan tingkat bunuh diri di Korea Selatan terutama terhadap kelompok rentan yaitu

bintang Korea akibat ancaman di dunia siber seperti *cyberbullying*.

3. Metode Penulisan

Metode kualitatif adalah jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode kualitatif digunakan peneliti untuk mengetahui kebijakan-kebijakan Pemerintah Korea Selatan dalam mengatasi ancaman *cyberbullying* terhadap *personal security* bintang Korea. Dalam mengkaji hal tersebut peneliti akan mengumpulkan berbagai data sekunder. Data sekunder pertama dari laman Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan yaitu *Ministry of health and welfare (mohw.go.kr)* yang memuat berbagai informasi terkait kesehatan mental di Korea Selatan serta laman dari *The Statistics Korea yaitu Statistics Korea (kostat.go.kr)* untuk mengetahui jumlah atau angka terkait tingkat bunuh diri di Korea Selatan dan peneliti juga mengakses laman *Statutes of the Republic of Korea (elaw.klri.re.kr)* dan *Korean Law Information Center (www.law.go.kr)* untuk mengakses undang-undang yang berlaku di Korea Selatan terutama Undang-undang yang berkaitan dengan keamanan siber.

Kedua, pengumpulan informasi dari berbagai literatur ilmiah yang kredibel seperti buku, jurnal, dokumen, majalah, koran maupun artikel yang membahas tentang *Human Security*, *cyberbullying*, bunuh diri dan *mental health* di Korea Selatan. Data-data sekunder akan direduksi atau dipilah untuk menentukan data yang mendukung penelitian ini serta melakukan verifikasi data secara objektif agar penelitian ini dapat diakui keabsahannya. Pada bagian selanjutnya data yang sudah didapat disajikan dan dianalisis dengan menggunakan konsep *Human Security*. Tujuannya adalah agar mampu membuktikan hipotesis penelitian bahwa Pemerintah Korea Selatan belum efektif mengatasi ancaman *cyberbullying* terhadap *personal security* bintang Korea karena kebijakan masih fokus pada aksi preventif dan cenderung mengabaikan aksi intervensi.

4. Pembahasan

Pemerintah Korea Selatan sebagai negara yang mengaminkan konsep *Human Security* terus berupaya untuk memenuhi *personal security* dengan pendekatan *top down* maupun *bottom up*. Upaya pemerintah dalam membangun kerja sama internasional seperti tergabung dalam *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, bersinergi dalam pencapaian target *Millenium Development Goals (MDGs)* dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, hingga pembentukan *the Korea Foundation for International Healthcare (KOFIH)* di tahun 2006 (Ministry of Health and Welfare, 2021). Semua langkah ini menunjukkan keseriusan Korea Selatan dalam mendukung konsep ini.

Hal ini terlihat dari kebijakan dan berbagai program Pemerintah Korea Selatan dalam mengatasi tingginya tingkat bunuh diri di Korea Selatan dan secara jelas menunjukkan bahwa konsep keamanan telah mengalami perkembangan pemaknaan bagi Pemerintah Korea Selatan. Maksudnya, keamanan tidak saja dilihat secara general atau secara nasional melainkan harus dilihat pula sejauh mana masyarakat atau individu merasa aman menjalani hidup di Korea Selatan. Hal tersebut telah menjadikan Korea Selatan sebagai negara yang menerapkan konsep *Human Security* meskipun tidak secara eksplisit mengeluarkan definisi tentang *Human Security* seperti yang dilakukan oleh Kanada maupun Jepang (Kim, Bae, & Shin, 2015: 2).

Salah satu jenis keamanan manusia berdasarkan UNDP 1994 adalah *personal security* atau keamanan individu. *Personal Security* menjadi hal yang menarik untuk diteliti di Korea Selatan. Hal ini karena *personal security* menjadi hal yang sangat penting untuk diciptakan oleh Pemerintah Korea Selatan mengingat tingginya kasus bunuh diri yang terjadi di Korea Selatan. Korea Selatan merupakan negara dengan kasus bunuh diri paling tinggi di Asia dan tertinggi keempat di dunia (Ilafi, 5 Negara dengan Tingkat Bunuh Diri yang Tinggi, Termasuk Korea Selatan, 2021). Bunuh diri atau *intentional self-harm (suicide)* menduduki peringkat kelima dari daftar sepuluh penyebab kematian tertinggi di Korea Selatan selama bertahun-tahun (KOSTAT, Causes

of Death Statistics , 2019). Tindakan bunuh diri tercatat telah menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Korea Selatan sejak 1983 (KOSTAT, Causes of Death Statistics , 2019). Secara statistik sekitar 26,9% masyarakat Korea Selatan dari 100.000 orang memutuskan untuk melakukan tindakan bunuh diri (KOSTAT, Causes of Death Statistics , 2019). Angka bunuh diri di Korea Selatan mengalami peningkatan di tahun 2018 yakni 9,5% dari tahun 2017 yaitu sekitar 26,6% (KOSTAT, Causes of Death Statistics , 2018). Hal serupa juga terjadi di tahun 2019 di mana angka bunuh diri mengalami kenaikan 0,9% sehingga menjadi 26,9% (KOSTAT, Causes of Death Statistics, 2019). Hal tersebut tentu mempengaruhi angka kematian Korea Selatan yang setiap tahun mengalami peningkatan. Secara usia kasus bunuh diri mayoritas datang dari kalangan muda dalam rentan usia 10-39 tahun dan juga terjadi di usia tua dalam rentan usia 40-59 tahun (Lee, et al., 2018: 1). Melihat tingginya angka bunuh diri di Korea Selatan maka Pemerintah Korea Selatan berupaya untuk menciptakan kebijakan atau program yang diharapkan mampu mengatasi tingginya tingkat bunuh diri.

Adapun program-program yang diupayakan oleh Pemerintah Korea Selatan terkait kesehatan mental dan bunuh diri yaitu:

Tabel 1 Program Pencegahan Bunuh Diri oleh Pemerintah Korea Selatan

Year	National Prevention Suicide Program or Plan
1995	<i>The Mental Health Act</i>
1998	<i>A Five Year Plan for National Mental Health realised</i>
2004	<i>The establishment of the first-5 year National Strategy for Suicide Prevention</i>
2005	<i>Suicide prevention programme was introduced into regional mental welfare centre</i>
2009	<i>The establishment of the second-5 year National Strategy for Suicide Prevention</i>
2010	<i>The establishment of integrated welfare system The expansion of the basic living subsidies The increase in the number of welfare officers</i>

2011	<i>The enactment of the Act on Preventing Suicide The inhibition of sales of paraquat pesticides The establishment of the Korea Suicide Prevention Centre (KSPC)</i>
2012	<i>The enforcement of the Act on Preventing Suicide (Suicide CARE) The introduction of Korean gatekeeper programme for suicide prevention entitled “watch, Listen and Talk”</i>
2013	<i>The introduction of management of emergency department based suicide attempts The certification of private suicide prevention</i>
2014	<i>The collaboration the government with the religious organizations The establishment of the Korea Psychological Autopsy Centre</i>
2015	<i>The expansion of screen door on the subway “Are you okay” campaign</i>
2016	<i>The establishment of the comprehensive national mental health care strategy “Air kiss” campaign</i>
2018	<i>the ‘National Action Plan for Suicide Prevention (2018–2022) The Suicide Prevention Policy Department established</i>

Sumber: Diolah dari (Sang-Uk, et al., 2018: 6), (Xiao, Mizoeva, Weston, & Etemadi, 2017: 6), (Liu, 2020), (World Health Organization, National suicide prevention strategies: progress, examples and indicators, 2018) dan (Na, et al., 2020: 1150).

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Korea Selatan sebetulnya telah menaruh perhatian terhadap pemenuhan *personal security* bagi masyarakat Korea Selatan sejak dua dekade silam. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan sebagai bentuk dukungan terhadap program dari *World Health Organization (WHO)* yaitu *The Mental Health Action Plan 2013-2020* (Sang-Uk, et al., 2018: 1). Program tersebut berisi serangkaian rencana untuk mengimplementasi berbagai program baik dalam skala nasional maupun multinasional sebagai upaya untuk mempromosikan pentingnya kesehatan mental serta serangkaian program lain yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tingkat bunuh diri dan yang paling utama adalah sebagai suatu strategi untuk menurunkan angka bunuh diri di setiap negara hingga 10% di tahun 2020 (World Health Organization, Mental Health Action Plan 2013-2020, 2013).

Tidak saja berfokus pada program-program tersebut namun Pemerintah Korea Selatan juga aktif dalam memanfaatkan perkembangan teknologi,

informasi dan komunikasi serta berkolaborasi dengan berbagai pihak non pemerintah untuk menekan angka bunuh diri di Korea Selatan. Hal ini terlihat dari beragam *campaign* yang dilakukan baik dengan memanfaatkan fasilitas publik seperti *screen door subway* (Sawada, Kang, Matsubayasih, Ueda, & Chung, 2015: 1). Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Korea karena *subway* merupakan salah satu tempat yang digunakan sebagai tempat bunuh diri.

Selain itu, muncul kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Korea Selatan dengan bintang Korea lewat *campaign air kiss* (Sang-Uk, et al., 2018: 6). *Campaign* ini berisikan video singkat dari salah seorang artis untuk sekedar menyapa, bertanya kabar dan memberikan doa serta semangat kepada sahabatnya dan memberikan *sign air kiss* kepada sahabatnya. Video tersebut kemudian akan direspons oleh sahabatnya yang akan menanyakan keadaan sahabat lain. Beberapa artis yang turut meramaikan *campaign* ini adalah Park Shin Hye, Nam Joo Hyuk dan Ryu Jun Yeol (Air Kisser, 2017). *Campaign* ini diharapkan mampu menyebarkan semangat positif dan menumbuhkan hubungan baik antar teman, keluarga maupun kenalan. Ini juga sebagai tanda bahwa ada rasa kepedulian antar satu dengan lainnya.

Selain adanya bantuan dari para bintang Korea ternyata kelompok non pemerintah di Korea Selatan baik yang berskala nasional maupun internasional juga memiliki peran aktif dalam isu ini. Hal ini terlihat dari adanya *South Korea Suicide Hotlines* (Suicide.org, 2021). Laman ini milik salah satu organisasi non pemerintah berskala internasional yang memuat beragam informasi maupun pelayanan terkait kesehatan mental maupun bunuh diri. Organisasi non profit ini memberikan informasi seputar tempat praktik dan hotline resmi yang telah dibagi per wilayah untuk memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya (Suicide.org, 2021). Selai *Suicide.org* ada pula laman lain yang berfungsi sama yakni *Therapy Route* (Therapy Route, 2020). Selain menyediakan kontak penting masyarakat juga bisa meminta pertolongan kepada terapis. Namun yang berbeda adalah kontak yang disediakan tidak dibedakan berdasarkan wilayah melainkan hanya menyertakan kontak dari

kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan, Pusat Krisis Kesehatan Mental, Lifeline Korea dan Pusat Konseling 24 jam (Therapy Route, 2020).

Kerja sama yang dibangun oleh Pemerintah Korea Selatan menunjukkan bahwa Korea Selatan sudah sangat optimal menjadikan gangguan kesehatan mental sebagai masalah sosial. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara pendekatan *Top-down* dan *Bottom-up* dalam menyelesaikan permasalahan ini. Selain itu perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat Korea Selatan dalam mendukung serangkaian program pemerintah maupun non pemerintah. Hal ini bisa diawali dengan terus membuka diri dan melawan stigma bahwa *mental disorder* merupakan hal yang memalukan atau aib yang seharusnya ditutupi. Seharusnya masyarakat menyadari bahwa gangguan kesehatan mental harus dibicarakan dan disembuhkan bukan menyembunyikan dan menganggap hal itu adalah sebuah aib.

Pemerintah Korea Selatan paham bahwa kesehatan mental memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebahagiaan dan keamanan hidup individu. Gangguan kesehatan mental bisa menyebabkan akibat buruk jika tidak diatasi secara serius dan dapat menjadi salah satu penyebab kematian di Korea Selatan. Hal ini dapat dilihat dari sajian data pada tabel.2 berikut ini.

Nama Wilayah	Jumlah penderita depresi	Angka kematian
Seoul	22.912	6,3%
Busan	14.502	5,9%
Daegu	7.317	5,2%
Incheon	8.975	8,0%
Gwangju	4.615	4,6%
Daejon	4.578	4,8%
Ulsan	4.555	5,4%
Seojong	912	6,1%
Gyeonggi-Do	41.975	6,2%
Gangwon-Do	15.807	5,8%

Chungcheongbuk-Do	12.489	6,1%
Chungcheongnam-Do	13.431	5,9%
Jeollabuk-Do	12.441	5,0%
Jeollanam-Do	19.552	3,9%
Gyeongsangbuk-Do	2.163	5,7%
Gyeongsangnam-Do	17.936	3,6%
Jeju-Do	5.050	4,1%

Tabel.2 *Feeling of depressions* tahun 2020 setiap wilayah di Korea Selatan

Sumber: (KOSIS, *Feelings of Depression*, 2021)

Tabel.2 menunjukkan adanya relasi antara depresi dan tingkat kematian. Depresi yang merupakan salah satu jenis penyakit mental terlihat menyumbang angka kematian yang cukup signifikan di setiap daerah di Korea Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa ada permasalahan mendasar yang harus diselesaikan terlebih dahulu dibanding hanya menyentuh ranah formal. Menurut Xiao, Weston, Mirzoeva, & Etemadi (2018: 4) salah satu hal yang melatarbelakangi tingginya kasus bunuh diri di Korea Selatan adalah *cultural factor*. Faktor kultural ini berkaitan dengan stigma masyarakat bahwa gangguan kesehatan mental merupakan satu hal yang memalukan. Belum lagi anggapan bahwa seseorang yang mengidap gejala gangguan kesehatan mental sering dikatakan jauh dari Tuhan (Xiao, Weston, Mirzoeva, & Etemadi, 2018:5). Meskipun Pemerintah telah berupaya untuk menjadikan permasalahan ini menjadi *social problem* ternyata hal tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal ini karena masih maraknya anggapan bahwa gangguan kesehatan mental seperti depresi adalah masalah individu yang mana harus diselesaikan sendiri.

Melawan stigma buruk terkait gangguan kesehatan mental memang bukan perkara mudah sehingga di tengah serangkaian strategi dan kebijakan Pemerintah Korea Selatan masih banyak fenomena bunuh diri yang terjadi di Korea Selatan. Kelompok terbanyak yang tercatat melakukan bunuh diri

adalah kelompok remaja (Yonhap, 2019). Keputusan untuk melakukan bunuh diri hadir karena kekhawatiran terhadap masa depan, tampilan fisik hingga masalah akademik. Kondisi ini semakin parah apabila para remaja dalam rentan usia tersebut mendapat gangguan atau menjadi korban *bullying* atau *cyberbullying*. Kekhawatiran menjadi korban *cyberbullying* cukup masuk akal mengingat waktu untuk mengakses internet oleh rata-rata remaja di Korea Selatan adalah 17 jam 48 menit per minggu (Yonhap, 2019). Ini merupakan alokasi waktu yang cukup untuk berinteraksi di media sosial. Meskipun Pemerintah Korea Selatan telah mengambil langkah kongkrit lewat beragam namun ternyata belum cukup mampu mengatasi ancaman siber salah satunya *cyberbullying*. Pasalnya produk hukum atau undang-undang yang mengatur tentang keamanan dalam dunia siber masih sangat terbatas ruang lingkungannya. Sedangkan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi hanya berfokus pada keamanan data negara, keamanan data personal, perlindungan dari bahaya *hacker*, digitalisasi pelayanan publik, dan fasilitasi publik. Sehingga perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang *cyberbullying* mengingat fenomena ini merupakan salah satu penyebab tingginya tingkat depresi dan bunuh diri di Korea Selatan terutama terhadap kelompok rentan yakni bintang Korea.

Oleh karena itu, ketika Sulli meninggal dunia pada Oktober 2019 akibat bunuh diri muncullah wacana untuk membentuk regulasi tambahan yakni *Bad Comments Prevention Law* atau yang dikenal sebagai *Sulli Law* atau *Sulli Act* (Maeil Business & mk.co.kr, 2019). Isi pokok dari *Sulli Act* adalah mengatasi ancaman *hate comments* yang biasanya ditinggalkan oleh para *Knetz* (*Korean netizen*) dalam kolom komentar artikel yang dirilis oleh media online seperti *Naver*, *Next*, dan *Nate* yang direncanakan ditutup kolom komentarnya sehingga para *haters* tidak bisa memberikan tanggapan lewat pesan teks maupun pesan gambar negatif kepada para bintang Korea oleh karena itu diusulkan agar *service provider* harus menampilkan ID dan *address* dari para penggunanya dalam waktu bersamaan sehingga dapat memudahkan pelacakan pelaku yang meninggalkan *hate comments* (Baek, 2020).

Menurut *Representative* Park Dae Chul dari Partai Liberal Korea yang menjabat sebagai salah satu anggota parlemen yakni perlu adanya amandemen terhadap produk hukum Korea Selatan yang mengatur tentang komunikasi di dunia maya yaitu *the Law on Promotion of Information and Communications Network Utilization and information Protection* atau *the Network Act* yang berupa regulasi yang mengatur tentang distribusi konten ilegal, termasuk konten-konten yang mengandung unsur pornografi, konten yang merusak reputasi orang lain, dan konten yang berbahaya bagi remaja. Oleh karena itu regulasi ini memuat tentang standarisasi konten dengan menerapkan metode *ex post review* yakni melakukan proses peninjauan yang dilakukan oleh *service operator* dan *content publisher* (Kim & Chang, 2019). Menurut Park Dae Chul perlu amandemen lagi untuk mengatur kewajiban dari *service provider* untuk menunjukkan ID dan *address* para pengguna karena dapat memudahkan pelacakan ketika terjadi tindak *cyberbullying* (Baek, 2020).

Pendapat serupa juga disampaikan oleh anggota lain yaitu Park Sun-Sook dari Partai Nasional Demokrasi Korea terutama mengenai masalah komentar negatif serta ujaran kebencian di dunia maya. Park Sun-Sook menyebutkan seharusnya tidak hanya korban saja yang bisa melaporkan kejadian ini namun para saksi atau orang lain yang melihat kejadian ini memiliki hak untuk melaporkannya (Baek, 2020). Park Sun-Sook juga menyampaikan bahwa masalah *hate speech* atau *cyberbullying* sebenarnya sudah diperhatikan sejak tahun 2010 namun regulasi yang bergulir secara eksplisit memang belum ada (Baek, 2020). Namun, untuk mengatur tentang masalah seperti *cyberbullying* biasanya hanya disandarkan pada *National Human Right Commission Act* yang memiliki tujuan seperti dijelaskan dalam pasal 1 yaitu untuk berkontribusi dalam menciptakan pemahaman tentang harkat dan martabat manusia secara setara dan berkeadilan sebagai tonggak utama dalam menjalankan kehidupan yang demokratis. Tindakan seperti menghina dan memfitnah melakukan tindakan diskriminatif menjadi hal pokok

yang diatur dalam undang-undang ini sehingga cukup sulit untuk menginvestigasi lebih jauh atau memberikan aksi intervensi kepada pelaku *cyberbullying* di Korea Selatan. Oleh karena itu, perlu regulasi yang secara rinci dan sistematis mengatur tentang regulasi *cyberbullying* dengan sanksi yang mampu memberikan efek jera bagi para pelaku sehingga di tahun 2019 pasca kematian Sulli muncullah petisi untuk merancang dan mengajukan *Sulli Act* atau *Bad Comments Prevention Law* namun hingga saat ini rancangan *Sulli Act* yang mengatur tentang *bad comments* belum disahkan (CNN, 2019).

Sulitnya menciptakan regulasi terkait *cyberbullying* secara sistematis di Korea Selatan menambah kerentanan dalam bersosial media baik di kalangan remaja namun pada kelompok selebritas sebagai kelompok rentan maupun masyarakat secara umum. Kelompok selebritas bisa dikatakan sebagai kelompok rentan karena sering menjadi korban *cyberbullying*. Popularitas yang dimiliki oleh para bintang Korea membuat mereka tidak luput dari perhatian publik. Publik merasa bahwa mengomentari kehidupan para bintang Korea merupakan suatu hal yang lumrah. Jika kondisi ini berlangsung lama dan secara terus menerus sehingga menyebabkan para bintang Korea berada dalam kondisi depresi bahkan beberapa di antaranya memilih untuk bunuh diri. Keputusan bunuh diri yang diambil oleh bintang Korea ternyata sudah berlangsung sejak lama seperti yang terlihat di bawah ini:

No	Nama Bintang Korea	Usia	Penyebab bunuh diri	Tahun Kematian
1.	Lee Eun Joo	24	Depresi	2005
2.	U-Nee	25	Depresi akibat <i>cyberbullying</i>	2007
3.	Jeong Da Bin	26	Depresi akibat <i>cyberbullying</i>	2007
4.	Choi Jin Sil	40	Depresi akibat <i>cyberbullying</i>	2008
5.	Ahn Jae-Hwan	36	Depresi	2008
6.	Daul Kim	20	Depresi akibat <i>cyberbullying</i>	2009
7.	Jang Ja Yong	29	Depresi karena menjadi korban pelecehan seksual	2009
8.	Kim Jong Hyun	19	Depresi	2017
9.	Jeon Tae Soo	34	Depresi	2018
10.	Jeon Mi Seon		Depresi	2019
11.	Sulli	25	Depresi akibat <i>cyberbullying</i>	2019
12.	Go Hara	28	Depresi akibat <i>cyberbullying</i>	2019
13.	Cha In Haa	27	Belum diketahui	2019

14.	Oh In Hye	36	Depresi	2020
15.	Park Ji Sun	36	Belum diketahui	2020

Tabel.3 Bintang Korea yang memutuskan untuk bunuh diri (2005-2020)

Sumber: Diolah dari (Dae-o, 2020), (Renushara, 2019), (Lim M. , 2019), (Syahrul, 2019) dan (Yip, et al., 2014)

Berdasarkan data di atas 13 dari 15 kematian para bintang Korea dari 2005-2020 adalah depresi. Depresi merupakan salah satu penyakit mental yang sangat berbahaya apalagi jika tidak ditangani secara serius. Dari 12 bintang Korea yang bunuh diri karena depresi 5 di antaranya atau hampir setengah dari mereka memilih bunuh diri karena *cyberbullying*. Hal ini menjadi menarik karena salah satu penyebab dari munculnya gangguan kesehatan mental di kalangan *public figure* seperti bintang Korea adalah tindakan *cyberbullying* (Saltz, 2017). Oleh karena itu, Pemerintah Korea Selatan tidak bisa hanya mengandalkan strategi preventif yakni berbagai program edukasi maupun fasilitas kesehatan sebaiknya Pemerintah Korea Selatan menyediakan strategi intervensi dalam hal ini adalah kerangka legal yang mengatur tentang aktivitas di *cyberspace*. Namun, hal yang paling mendasar yang seharusnya diperhatikan adalah *cultural factor*. Seperti yang disampaikan oleh Xiao, Weston, Mirzoeva, & Etemadi (2018: 5) bahwa faktor kultural berpengaruh besar dalam penanganan kesehatan mental maupun bunuh diri.

Seperti halnya masyarakat Korea Selatan lain yang juga ingin merasa aman dan nyaman dalam menjalani hidup apalagi dengan beban kerja yang tinggi, tekanan dari berbagai pihak, keterbukaan dalam menerima segala informasi di berbagai media dan media sosial pribadi mereka membuat mereka berada dalam posisi yang sangat rentan. Padahal jika dianalisis lebih lanjut tindakan bunuh diri yang dilakukan bintang Korea tentu berpengaruh pada penggemarnya. Bukan menjadi hal yang tidak mungkin jika para penggemar akan mengikuti langkah bunuh diri yang dilakukan oleh idolanya.

Hal ini juga seharusnya menjadi pertimbangan selain melihat mereka sebagai alat *soft power diplomacy* Korea Selatan yang membawa

keuntungan kepada Korea Selatan. Saat ini perlu dikuatkan lagi kolaborasi antar kelompok *Top-down dan Bottom-up* dengan segala program baik itu intervensi maupun preventif. Pada dasarnya pihak Pemerintah, organisasi non pemerintah maupun masyarakat Korea Selatan memiliki tanggung jawab bersama untuk mengatasi *social problem* ini.

Fenomena bunuh diri di kalangan bintang Korea menunjukkan adanya ketidaksempurnaan dari berbagai kebijakan maupun regulasi yang sudah bergulir di Korea Selatan. Upaya pemenuhan *personal security* menjadi suatu hal yang belum sepenuhnya dicapai oleh negara maju seperti Korea Selatan. Seharusnya Pemerintah Korea Selatan tidak saja memberikan perhatian pada aspek normatif melainkan melihat aspek-aspek lain seperti aspek sosial dan budaya yang mana memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat Korea Selatan. Konstruksi budaya memiliki pengaruh yang sangat dasar dan besar dalam kehidupan seseorang sehingga alih-alih hanya melihat di tataran normatif baiknya mencari tahu akar permasalahan terlebih dahulu. Hal ini sebagai upaya untuk mendorong efektivitas program Pemerintah Korea Selatan baik dalam aksi preventif maupun intervensi.

Sebagai salah satu ancaman dalam *personal security* (Saltz, 2017) maka seharusnya *cyberbullying* dapat disikapi secara lebih serius lewat pendekatan *Top-down* maupun *Bottom-up*. Pendekatan ini dilakukan untuk menciptakan kondisi kesehatan mental yang baik bagi para bintang Korea. Hal ini karena para bintang Korea dikategorikan sebagai kelompok rentan dan rawan terkena *cyberbullying* karena popularitas (Halodoc, 2020). Berbeda dengan masyarakat biasa, interaksi yang dibangun oleh bintang Korea berskala lebih masif karena popularitasnya. Namun, untuk berbagai tindakan *cyberbullying* pasti juga dirasakan oleh kelompok masyarakat lain tetapi dengan jumlah dan intensitas yang tidak sama dengan bintang Korea.

Dibutuhkannya undang-undang terkait dikarenakan tingginya kasus *cyberbullying* yang menimpa masyarakat Korea Selatan terutama para bintang Korea sehingga kerangka legal yang hanya berfokus pada keamanan data di *cyberspace* tidak cukup untuk menekan angka bunuh diri. Urgensi

dari dibutuhkannya kerangka legal untuk mengatur *hate comments* sejatinya sudah muncul sejak lama namun kembali muncul ke permukaan pasca terjadinya aksi bunuh diri yang dilakukan oleh Sulli di tahun 2019. Kasus beruntun pun terjadi di tahun ini di mana pasca Sulli meninggal pada Oktober 2019 muncul kasus bunuh diri kedua oleh Goo Hara pada November 2019 dan pada Desember 2019 kasus ketiga dilakukan oleh Cha In Haa (Dae-o, 2020). Fenomena ini dikabarkan terjadi karena para bintang Korea menjadi korban *cyberbullying*. Melihat fenomena ini akhirnya masyarakat mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas tentang kasus Sulli lalu Majelis Nasional Korea Selatan mengajukan Rancangan Undang- Undang Sulli (RUU Sulli) atau *Sulli Act* yang mengatur tentang komentar jahat atau *cyberbullying* untuk dibahas Parlemen pada Desember 2019 (CNN, 2019). Namun, sangat disayangkan hingga saat ini pembahasan mengenai RUU Sulli atau *Sulli Act* belum disahkan (Ulfa, 2019). Kegagalan dalam mengesahkan *Sulli Act* yang bertujuan untuk mengatasi ancaman *hate comments* karena *Sulli Act* dianggap kurang memiliki urgensi mengingat upaya untuk mengatasi *cyberbullying* telah diatur sejak tahun 2007 bahwa identitas asli orang divalidasi melalui nomor registrasi sosial mereka dan nama sebenarnya yang digunakan dalam posting atau aktivitas online lainnya. Artinya Pemerintah menganggap regulasi terkait *cyberbullying* sudah cukup dilakukan karena jika diteruskan akan menciptakan opini bahwa adanya pembatasan dalam berekspresi dan berpendapat yang bertentangan dengan ciri Korea Selatan sebagai negara demokrasi (Lim J. , 2019). Selain kedua alasan tersebut diketahui juga bahwa waktu pengajuan *Sulli Act* juga berdekatan dengan munculnya pandemi Covid-19 sehingga prioritas Pemerintah Korea Selatan lebih banyak digunakan untuk mengatasi pandemi. Hal ini tentu ikut mengancam *personal security* di Korea Selatan terutama bintang Korea karena pada dasarnya para bintang Korea selalu dituntut untuk menjadi sempurna sehingga ketika mereka melakukan hal yang sedikit berbeda atau pun memiliki ciri fisik yang agak berbeda maka mereka lebih rentan menjadi

korban *cyberbullying* (Pasinringi, 2021). Hal ini karena telah adanya konstruksi nilai yang berkembang di Korea Selatan bahwa menjadi berbeda itu menakutkan sehingga mayoritas masyarakat Korea Selatan takut untuk menjadi berbeda (Singh, 2017). Tuntutan untuk terus menjadi sempurna ini merupakan salah satu beban besar yang dipikul oleh para bintang Korea tentu jika ditambah dengan beragam tekanan lewat interaksi di media sosial dapat membuat mereka masuk ke dalam situasi rentan karena memiliki lebih banyak tekanan dibandingkan dengan masyarakat umum. Hal ini tentu membuat mereka lebih mudah terkena berbagai gangguan penyakit mental seperti stres atau depresi yang bisa berujung pada aksi bunuh diri apabila tidak ditangani dengan baik.

Selain dituntut untuk menjadi sempurna ternyata melayangkan komentar negatif terhadap bintang Korea juga dianggap sebagai hal yang lumrah dilakukan (Pasinringi, 2021). Anggapan ini berkembang karena industri Korea Selatan selalu menuntut mengarahkan para bintang Korea untuk memenuhi ekspektasi dari masyarakat. Misalnya, para idol perempuan harus selalu terlihat cantik, menawan, imut tetapi harus seksi sedangkan para idol laki-laki harus terlihat baik, sopan, *manly* tampan. Imaginasi ini terus dipupuk oleh industri hiburan Korea Selatan hingga menyebabkan para bintang Korea tidak bisa dengan leluasa menjadi diri mereka sendiri. Pada akhirnya, para bintang Korea selalu dipaksa untuk memenuhi ekspektasi dari masyarakat Korea Selatan yang suka *uniforming* dan kesempurnaan sehingga melupakan kenyataan bahwa para bintang Korea juga merupakan manusia biasa seperti mereka. Hal-hal di atas merupakan fenomena yang mendasari aktivitas *cyberbullying* terhadap para bintang Korea.

Untuk mengatasi hal tersebut seharusnya Pemerintah Korea Selatan melakukan pendekatan baik secara *Top-down* maupun *Bottom-up* mengingat bintang Korea merupakan alat *soft power diplomacy* dari Korea Selatan. Mereka tidak seharusnya hanya dijadikan sebagai komoditas untuk meningkatkan kualitas ekonomi makro di Korea Selatan tetapi harus juga diberikan dukungan bukan hanya tuntutan. Peralnya, jika terjadi hal-hal yang

buruk terhadap mereka seperti bunuh diri tentu memberikan pengaruh yang cukup masif.

Selain kekurangan payung hukum yang kuat ternyata budaya di Korea Selatan justru menambah kemungkinan terjadi ancaman *cyberbullying* karena budaya berkomentar negatif bagi bintang Korea merupakan hal yang lumrah didapatkan oleh bintang Korea sehingga mereka pantas mendapatkannya. Para *K-netz* yang sering melontarkan komentar negatif meyakini bahwa jika tidak ingin dihujat atau dikomentari maka jangan menjadi populer. Hal ini seolah-olah menggeser nilai atau kedudukan para bintang Korea sebagai individu atau manusia yang memiliki perasaan seperti manusia lainnya hanya dipandang sebagai komoditas industri hiburan Korea Selatan dan selalu dituntut untuk menjadi sempurna. Selain itu adanya stigma sosial yang menganggap penyakit mental merupakan suatu hal yang memalukan membuat masyarakat termasuk bintang Korea cukup enggan menghubungi para profesional padahal mereka sebenarnya membutuhkan pertolongan. Masyarakat Korea Selatan yang suka dengan penyeragaman cukup risih ketika melihat para bintang Korea bertutur, bertindak, berpikir yang tidak sesuai dengan nilai atau ekspektasi mayoritas masyarakat maupun *toxic fandom* sehingga mereka menjadi rentan untuk diserang dengan berbagai *hate comments* di media sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa masih tingginya angka bunuh diri baik di lingkup masyarakat Korea Selatan secara umum maupun bintang Korea Selatan secara khusus tidak bisa teratasi hanya sebatas mengandalkan pendekatan *Top down* saja tetapi perlu adanya kolaborasi antara pendekatan *Top-down* dan *Bottom-up*. Terlebih lagi, pendekatan *Bottom-up* yang bersumber dari aktivitas masyarakat untuk mengambil peran dalam mengupayakan *personal security* agar dominasi nilai, stigma sosial dan budaya terkait kesehatan mental maupun tindakan bunuh diri di Korea Selatan dapat dipahami secara benar oleh masyarakat. Oleh karena itu, produk hukum bukan menjadi satu-satunya alasan tingginya

tingkat bunuh diri di Korea Selatan melainkan juga pengaruh terkait budaya dan stigma sosial yang berkembang di Korea Selatan turut memberikan pengaruh besar. Aksi preventif dan Intervensi harus dikolaborasikan secara efektif dan berkelanjutan agar masalah terkait *cyberbullying* dan tingkat bunuh diri di Korea Selatan dapat diatasi dengan baik.

Kesimpulan

Meskipun telah mengupayakan tindakan *top-down* dan *bottom-up* sebagai Upaya dalam penyelenggaraan *Human Security* di Korea Selatan namun ternyata upaya yang dilakukan belum sepenuhnya efektif. Perlu ada pembaharuan yang berkelanjutan dan peningkatan strategi dengan lebih memfokuskan pada aksi preventif mengingat langkah awal merupakan solusi paling utama yang diupayakan untuk menekan hal buruk yang akan terjadi di kemudian hari.

References

Artikel Jurnal

- Adinda FA, J. Q. (2019). Gagasan Human Security Dalam Kebijakan Personal Security Tinjauan Terhadap Draft Rancangan Undang-Undang. *Responsive*, 8-13.
- Bhat, C. S., Chang, S.-H., & A, M. (2013). Cyberbullying in Asia. *Education about Asia*, 36-39.
- Daniel, S. N. (2021, 02 28). *Urgensi Cyber Bullying dalam Personal Security sebagai Salah Satu Elemen Human Security*. Retrieved from Academia.edu: <https://independent.academia.edu/DanielSabda>
- Issac, M., Elias, B., Katz, L. Y., Belik, L.-S., Deane, F. P., Enns, M. W., & Team, T. S. (2009). Gatekeeper Training as a Preventative Intervention for. *La Revue canadienne de psychiatrie*,, 260-268.
- Kim, E. M., Bae, S. Y., & Shin, J. H. (2015, March). Human Security in Practice: East Asian Experiences. *The Case of South Korea*, pp. 1-36.
- Doboo, S. (2014). The Cyber Bullying of Pop Star Tablo and South Korean Society: Hegemonic Discourses on Educational Background and Military Service. *Acta Koreana*, 479-504.
- Lee, S.-U., Park, J.-I., Lee, S., Oh, I.-H., Choi, J.-M., & Oh, C.-M. (2018). Changing trends in suicide rates in South Korea from 1993 to 2016: a descriptive study. *BMJ Open*, 1-8.
- Liu, J. (2020). Need to establish a new adolescent suicide prevention programme in South Korea. *BMJ Open*, 1-7.
- Sawada, Y., Kang, S., Matsubayasih, T., Ueda, M., & Chung, Y. (2015). Subway Platform Screen Doors (PSDs) and Suicides in Korea. 1-20.
- Singh, A. (2017, October 31). *The "Scourge of South Korea": Stress and Suicide in Korean Society*. Retrieved from bpr.berkeley.edu: <https://bpr.berkeley.edu/2017/10/31/the-scourge-of-south-korea-stress-and-suicide-in-korean-society/>
- Suh, T. (2010). History of the Korean Mental Health Ac. *J Korean Neuropsychiatr Assoc*, 144-148.

Xiao, C., Weston, S., Mirzoeva, F., & Etemadi, F. (2018). Suicide Prevention for Elderly in South Korea. 1-8.

Yip, P., Chee, H., Fu, K.-W., Chang, S.-S., Lee, W., Gunnell, D., & Chen, Y.-Y. (2014). The Impact of a Celebrity's Suicide on the Introduction and Establishment of a New Method of Suicide in South Korea. *International Academy for Suicide Research*, 221-226.

Sang-Uk, L., Jong-Ik, P., Soojung, L., In-Hwan, O., Juong-Myung, C., & Chang-Mo, O. (2018). Changing trends in suicide rates in South Korea from 1993 to 2016: a descriptive study. *BMJ Open*, 1-9

Buku

Boer, M. d., & Wilde, J. d. (2008). Top-Down and Bottom-Up Approaches to Human Security. In M. d. Boer, & J. d. Wilde, *The Viability of Human Security* (pp. 9-20). Amsterdam: Amsterdam University Press.

Website dan Portal Berita

Air Kiss. (2017). *Videos of Air Kiss*. Retrieved from <https://www.bing.com/videos/search?q=air+kiss+campaign&qpv=air+kiss+campaign+&FORM=VDRE>

AstraZeneca Young Health Programme. (n.d.). *YHP-South Korea SafeTalk*. Retrieved from YoungHealthProgrammeYHP.com:

<https://www.younghealthprogrammeyhp.com/programmes/korea.html>

Baek, Y. (2020, 10 15). 故 설리 1주기... '설리법' 어디까지 왔나? (*edaily.co.kr*).

Retrieved from www.edaily.co.kr:

<https://www4.edaily.co.kr/news/read?newsId=01226726625933248&mediaCodeNo=258>

Center, C. R. (2021, 02 25). *Cyberbullying Research Center*. Retrieved from Cyberbullying Research Center: <https://cyberbullying.org/>

CNN. (2019, 11 26). *Maju-mundur RUU 'Komentor Jahat' Usai Kematian Artis Korsel*.

- Retrieved from CNN:
<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20191126204502-234-451768/maju-mundur-ruu-komentar-jahat-usai-kematian-artis-korsel>
- Dae-o, K. (2020, 01 04). *I have reported on 30 Korean celebrity suicides. The blame game never changes.* Retrieved from The Guardian:
<https://www.theguardian.com/music/2020/jan/04/i-have-reported-on-30-korean-celebrity-suicides-the-blame-game-never-changes>
- Halodoc. (2020, 05 27). *Orang Dewasa juga Rentan Jadi Korban Cyberbullying.* Retrieved from Halodoc.com:
<https://www.halodoc.com/artikel/orang-dewasa-juga-rentan-jadi-korban-cyberbullying>
- Hello Sehat. (2021). *Apa Bedanya Stres dan Depresi? Kenali Gejalanya.* Retrieved from Hello Sehat: <https://hellosehat.com/mental/gangguan-mood/kenali-perbedaan-stres-dan-depresi-sebelum-terlambat/>
- Ilafi, A. (2021, Juli 25). *5 Negara dengan Tingkat Bunuh Diri yang Tinggi, Termasuk Korea Selatan.* Retrieved from IDN Times:
<https://www.idntimes.com/science/discovery/anoraga-ilafi/negara-dengan-tingkat-bunuh-diri-tinggi-c1c2/4>
- Ilafi, A. (2021, Juli 25). *Negara dengan Tingkat Bunuh Diri Tertinggi.* Retrieved from IDN Times:
<https://www.idntimes.com/science/discovery/anoraga-ilafi/negara-dengan-tingkat-bunuh-diri-tinggi-c1c2/5>
- Kim & Chang. (2019, 12 5). *Spotlight: Free Speech and Media Freedom in South Korea.* Retrieved from www.Lexology.com:
<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5757118f-4626-41dd-b798-e6581a992ad5>
- Lim, J. (2019, 10 29). *After K-pop death, 'Sulli's Law' being considered to fight cyberbullying.* Retrieved from South China Morning:

Fadhilah Permata Nira

<https://www.bing.com/search?q=sulli+act+and+freedom+of+speech+in+south+korea&qsn=&form=QBRE&sp=-1&pq=sulli+act+and+freedom+of+speech+in+so&sc=0-38&sk=&cvid=1FDDC430FF954F87B00445B83C12AA3D>

Lim, M. (2019, October 15). *9 celebrity suicides over the years that highlight immense pressures of Korean showbiz*. Retrieved from Mothership: <https://mothership.sg/2019/10/korean-celebrity-suicides/>

LLC, Y. (2019, 02 25). *Cybersecurity in South Korea*. Retrieved from LEXOLOGY: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=016a929c-ad58-4d1d-8bf6-807b4272863e>

Maeil Business & mk.co.kr. (2019, 10 16). '설리 비보'에도 국회 '악플방지법' 심사는 지지부진 - 매경ECONOMY (mk.co.kr). Retrieved from www.mk.co.kr: <https://www.mk.co.kr/news/politics/view/2019/10/839660/>

Pasinringi, T. (2021, July 7). *Kesehatan Mental dan Naik-Turun Hidup jadi Idola K-Pop*. Retrieved from Magdalene: <https://magdalene.co/story/Kesehatan-Mental-Idola-K-Pop>

Pricilla, A. A. (2021, Oktober 11). *5 Drakor ini Angkat Soal Kesehatan Mental*. Retrieved from hotdetik.com: <https://hot.detik.com/kdrama/d-5762097/5-drakor-ini-angkat-soal-kesehatan-mental>

Putri, A. W. (2018, 02 02). *Menjajal Mati di Korea Selatan*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/menjajal-mati-di-korea-selatan-cD7C>

Renushara. (2019, November 26). *7 K-Pop Stars Who Tragically Committed Suicide Due to Depression*. Retrieved from World of Buzz: <https://worldofbuzz.com/7-k-pop-stars-who-tragically-committed-suicide-due-to-depression>

Saltz, S. (2017, May 20). *New Research: Cyberbullying Linked with Depression, Emotional Abuse*. Retrieved from American Psychiatric Association: <https://www.psychiatry.org/newsroom/news-releases/new-research-cyberbullying-linked-with-depression-emotional-abuse>

Syahrul. (2019, October 19). *hese 7 South Korean Celebrities Who Committed*

- Suicide Besides Sulli*. Retrieved from Hype.me:
<https://hype.my/2019/174820/sulli-south-korean-celebrities-suicide/>
- Tabloidbintang.com. (n.d.). *Self love-BTS*. Retrieved from Tabloidbintang.com:
<https://www.tabloidbintang.com/lirik-lagu/read/674/lirik-lagu-answer-love-myself-bts>
- Therapy Route. (2020, February 19). *SUICIDE HOTLINES AND CRISIS LINES IN SOUTH KOREA*. Retrieved from Therapy Route:
<https://www.therapyroute.com/article/suicide-hotlines-and-crisis-lines-in-south-korea>
- Ulfa, M. (2019, Oktober 18). *Korsel Akan Buat RUU Sulli Act untuk Atasi Cyber Bullying*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/korsel-akan-buat-ruu-sulli-act-untuk-atasi-cyber-bullying-ejWL>
- Watkins, J. (2018, February 9). *SOUTH KOREA'S MENTAL HEALTH PROBLEM – THAT KOREANS DON'T ADMIT*. Retrieved from Ozy.com:
<https://www.ozy.com/around-the-world/south-koreas-mental-health-problem-that-koreans-dont-admit/83629/>
- Yolanda, F. (2019, 11 18). *Terapi Mati, Cara Warga Korea Menghargai Kehidupan*. Retrieved from
Republika.co.id:
<https://www.republika.co.id/berita/q14djo370/terapi-mati-cara-warga-korea-menghargai-kehidupan>
- Yonhap. (2019, 5 1). *Suicide No. 1 cause of death for S. Korean teens, youths*. Retrieved from The Korea Herald:
<http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20190501000216>
- Yoon, L. (2021, 11 23). *Suicide rate South Korea 2000-2020*. Retrieved from Statista.com:
<https://www.statista.com/statistics/789337/south-korea-suicide-death-rate/>
- Yusron, A. A. (2020, Juli 8). *Undang-Undang Sulli Belum Berhasil Terwujud*. Retrieved from hotdetik.com: <https://hot.detik.com/kpop/d-5085513/undang-undang-sulli-belum-berhasil-terwujud>

Report

Kim, H., Kwon, S. W., Jeon, H. J., Park, S., & Hong, J. P. (2019). Implementation and outcomes of suicide-prevention strategies by restricting access to lethal suicide methods in Korea. *Public Health Policy*, 91-102.

Korea Internet & Security Agency. (n.d.). *Laws on the Internet and Information Security of Korea*.

KOSIS. (2020, 11 22). *Deaths and death rates by cause*. Retrieved from KOSIS: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1B34E01&conn_path=h=I2&language=en

KOSIS. (2021, Juni 16). *Feelings of Depression*. Retrieved from KOSIS: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=177&tblId=DT_H_MENTAL_DEPRESS&conn_path=I2&language=en

KOSIS. (2021, Juni 16). *Perceived Stress*. Retrieved from KOSIS: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=177&tblId=DT_H_MENTAL_STRESS&conn_path=I2&language=en

KOSTAT. (2018, Desember). *Causes of Death Statistics* . Retrieved from KOSTAT: <http://kostat.go.kr/portal/eng/pressReleases/8/10/index.board>

KOSTAT. (2019, Desember). *Causes of Death Statistics* . Retrieved from KOSTAT: <http://kostat.go.kr/portal/eng/pressReleases/8/10/index.board>

KOSTAT. (2019, Desember). *Preliminary Results of Birth and Death Statistics*. Retrieved from KOSTAT: <http://kostat.go.kr/portal/eng/pressReleases/8/10/index.board>

KOSTAT. (2020, Desember). *Preliminary Results of Birth and Death Statistics*. Retrieved from KOSTAT: <http://kostat.go.kr/portal/eng/pressReleases/8/10/index.board>

Ministry of Health and Welfare . (2021). *Global Cooperation*. Retrieved from Ministry of Health and Welfare: http://www.mohw.go.kr/eng/pl/pl0104.jsp?PAR_MENU_ID=1003&MENU_ID=100327

Na, K.-S., Park, S.-C., Kwon, S.-J., Kim, M., Kim, H.-J., Baik, M., . . . Lee, H.-Y. (2020).

Contents of the Standardized Suicide Prevention Program for Gatekeeper Intervention in Korea, Version 2.0. *Psychiatri Investigation* , 1149-1157.

National Security Office. (n.d.). *National Cybersecurity Strategy*.

OECD, O.-o. a. (2017). *Suicide Rates*. Retrieved from OECD Data: <https://data.oecd.org/healthstat/suicide-rates.htm>

OECD.org. (n.d.). *OECD and the Sustainable Development Goals: Delivering on universal goals and targets*. Retrieved from OECD.org: <https://www.oecd.org/dac/sustainable-development-goals.htm>

OECD.org. (n.d.). *About*. Retrieved from OECD.org: <https://www.oecd.org/about/#:~:text=The%20Organisation%20for%20Economic%20Co-operation%20and%20Development%20%28OECD%29,insights%20to%20better%20prepare%20the%20world%20of%20tomorrow.>

Suicide.org. (2021). *South Korea Suicide Hotlines*. Retrieved from Suicide.org: <http://www.suicide.org/hotlines/international/south-korea-suicide-hotlines.html>

Sangmi, C., & Yi, H. Y. (2019, 11 28). *Cyber bullying, star suicides: The dark side of South Korea's K-pop world*. Retrieved from REUTERS: <https://www.reuters.com/article/us-southkorea-kpop-idUSKBN1Y20U4>

United Nations Development Programme. (1994). *Human Development Report 1994*. Retrieved from United Nations Development Programme: New Dimensions of Human Security: <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-1994>

World Health Organization. (2013, January 6). *Mental Health Action Plan 2013-2020*. Retrieved from World Health Organization: http://www.who.int/mental_health/publications/action_plan/en/

World Health Organization. (2018). *National suicide prevention strategies: progress, examples and indicators*. Switzerland: World Health Organization.

World Health Organization, & Ministry of Health and Welfare South Korea. (2006).

Fadhilah Permata Nira

WHO-AIMS Report Mental Health System in Republic of Korea. Seoul: World Health Organization.

Xiao, C., Mizoeva, F., Weston, S., & Etemadi, F. (2017). Suicide Prevention for The Elderly in South Korea. *Health Policy Brief*, 1-19.